



DINAS KOPERASI UMKM
KOTA DENPASAR

PENERAPAN PERMENKOP UKM DAN SAK ENTITAS PRIVAT

Kampus UT, Denpasar, 14 Desember 2024

Agung Nur Fajar



AGENDA

1. Permen Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi
2. Perbedaan SAK-EP dengan SAK-ETAP
3. Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan
4. Kebijakan Akuntansi untuk Usaha Simpan Pinjam Koperasi sesuai SAK-EP dan Penyesuaian yang diperlukan oleh Koperasi



PERMEN Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi



LATAR BELAKANG

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan laporan keuangan Koperasi karena **tidak bisa mengakomodir laporan konsolidasi bagi Koperasi yang memiliki beberapa unit usaha dan pemisahan laporan pendapatan bagi anggota dan non anggota.**
2. PermenkopUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill, PermenkopUKM No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dan PermenkopUKM No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat.
3. SAK ETAP akan diganti dengan **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)** yang berlaku **per Januari 2025.**

ISI PERMEN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN 2024

Permen ini terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, sebagai berikut:

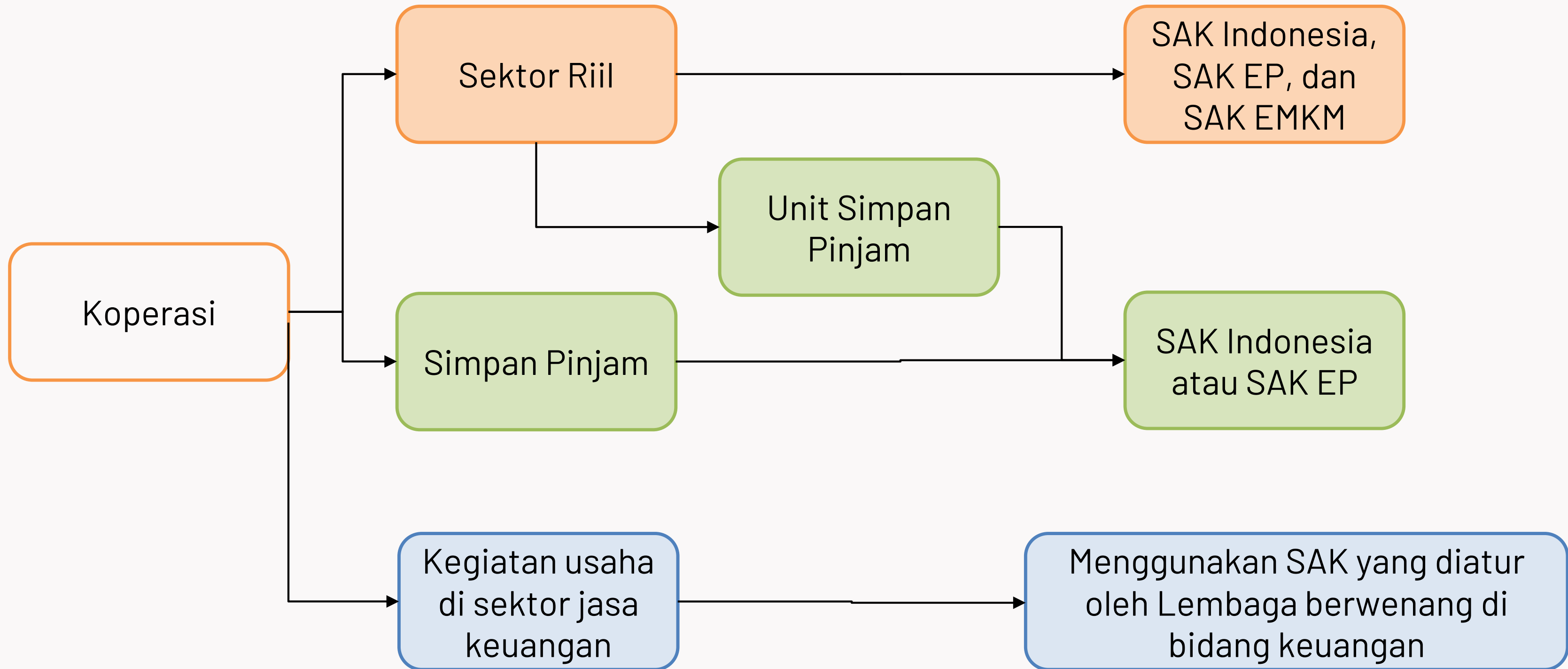
1. Bab I Ketentuan Umum;
2. Bab II Akuntansi Koperasi;
3. Bab III Laporan Keuangan Koperasi;
4. Bab IV Audit Laporan Keuangan;
5. Bab V Ketentuan Lain-Lain;
6. Bab VI Sanksi Administratif;
7. Bab VII Ketentuan Penutup.

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN AKUNTANSI KOPERASI

Berdasarkan Pasal 3 Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024, kebijakan akuntansi yang diatur:

1. Penyajian Laporan Keuangan
2. Akuntansi Aset
3. Akuntansi Liabilitas
4. Akuntansi Ekuitas
5. Akuntansi dana syirkah temporer (hanya untuk KSPPS/ USPSS)

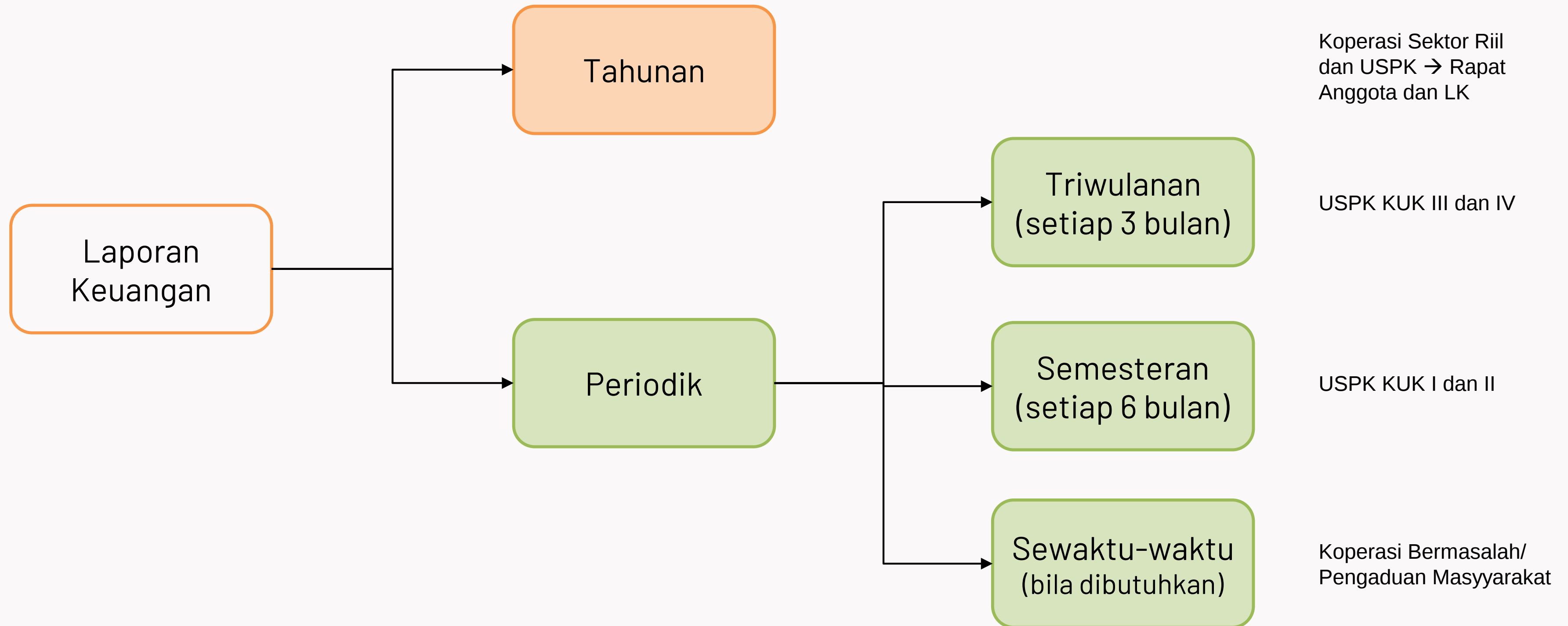
AKUNTANSI KOPERASI



LAPORAN KEUANGAN

- Laporan Keuangan **wajib disajikan dan disusun dengan kebijakan akuntansi** bagi Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP Koperasi)/ KSP, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPPS Koperasi)/ KSPPS, Koperasi Sektor Riil, serta Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan
- Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan oleh Pengurus Koperasi dan disusun dalam **Bahasa Indonesia** dengan menggunakan **mata uang Rupiah**
- Laporan Keuangan memuat **tanda tangan pengurus** dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus atas kebenaran informasi yang disajikan

LAPORAN KEUANGAN



PERIODE LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

Pelaporan	Triwulan I	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Periode Laporan Keuangan	Januari - Maret	Januari - Juni	Januari - September	Januari - Desember
Tanggal maksimal Pelaporan	20 April	20 Juli	20 Oktober	30 April (Primer) 30 Juni (Sekunder)
KSP/KSPPS (KUK 3 & 4)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan 3	Tahunan
KSP/KSPPS (KUK 1 & 2)	-	Semester	-	Tahunan
USP/USPPS	-	Semester	-	Tahunan
Sektor Riil	-	-	-	Tahunan

*) Laporan Keuangan USP/USPPS pada Koperasi Sektor Riil disajikan secara terpisah dari usaha sektor riil koperasi

**) Koperasi Sektor Riil yang memiliki USP/USPPS tetap menyajikan laporan keuangan keseluruhan usahanya (gabungan)

ILUSTRASI PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI

		Tahun		2024												2025									
		Bulan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	-	-	
KSP / KSPPS	KUK 3 & KUK 4	data	TB 2023																						
		laporan					20				20			20					30						
		data	TB 2024																						
		laporan																	20			20			
KSP / KSPPS	KUK 1 & KUK 2	data	TB 2023																						
		laporan								20									30						
		data	TB 2024																						
		laporan																				20			
USP / USPPS		data	TB 2023																						
		laporan								20									30						
		data	TB 2024																						
		laporan																				20			
Sektor Riil		data	TB 2023																						
		laporan																	30						
		data	TB 2024																						
		laporan																							

KSP/KSPPS KUK 3 dan 4 memiliki kewajiban pelaporan paling lambat pada bulan April:

1. Tanggal 20: Laporan periodik 3 bulan (triwulan 1)
2. Tanggal 30: Laporan tahunan Koperasi Primer

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan tahunan kepada Kementerian dan/atau Dinas sesuai dengan kewenangannya

Wilayah Keanggotaan
dalam 1 kabupaten/kota

Bupati/Wali Kota

Wilayah Keanggotaan lintas
kabupaten/kota
dalam 1 provinsi

Gubernur

Wilayah Keanggotaan
lintas provinsi

Menteri

PELAPORAN LAPORAN KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK

Laporan Keuangan wajib disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik yang dibuat oleh Kementerian <https://ods.kemenkopukm.go.id/>

- **PENGECUALIAN:**
 - Koperasi berkedudukan di daerah yang **belum tersedia jaringan telekomunikasi**
 - Koperasi baru **beroperasi paling lama 2 bulan** setelah melakukan kegiatan operasional
 - Keadaan **kahar** → kerusakan/ gangguan pangkalan data/ jaringan komunikasi
- Laporan secara manual dilakukan melalui surat pemberitahuan beserta alasan dari Pengurus Koperasi kepada Kementerian dan/ atau Dinas

AUDIT LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan KSP/ USPK, KSPPS/ USPPS Koperasi yang **memiliki modal $\geq$ 5 Miliar Rupiah** dalam **1 tahun buku wajib diaudit Akuntan Publik**



AP melakukan audit **paling lama 3 tahun berturut-turut**, dengan jeda 2 tahun:
Bagaimana dengan KAP?

SANKSI ADMINISTRATIF

1. Teguran tertulis pertama dan kedua
2. Penangguhan penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi
3. Penurunan penilaian Kesehatan
4. Pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam
5. Pencabutan izin usaha simpan pinjam
6. Penutupan USP Koperasi/ USPPS Koperasi atau pembubaran koperasi



MENGENAL SAK-EP

(DAN PERBEDAANNYA DENGAN SAK-ETAP)



ENTITAS PRIVAT

ENTITAS PRIVAT adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki **akuntabilitas publik**, dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk **tujuan umum** bagi pengguna eksternal (pihak yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis: Anggota, Kreditur, dll)

Koperasi Simpan Pinjam sebenarnya memiliki akuntabilitas publik, karena menguasai asset dalam kapasitas fidusia bagi suatu kelompok pihak luar yang beragam sebagai usaha utamanya, yang menguasai dan mengelola sumber daya keuangan yang dipercayakan kepada Koperasi oleh anggota dan koperasi lainnya.yang tidak terlibat dalam manajemen Koperasi.. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik seharusnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, tetapi Kementerian Koperasi sebagai regulator usaha simpan pinjam telah menetapkan Usaha Simpan Pinjam Koperasi untuk menggunakan SAK Entitas Privat mulai Januari 2025 (Permen Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi).

PILAR STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA DAN SAK ENTITAS PRIVAT (SAK EP)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum yang berbasis IFRS

Standar Akuntansi
Keuangan (SAK)

=

Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan
(PSAK)

+

Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan
(ISAK)

Efektif mulai 1 Januari 2015, standar yang berlaku di Indonesia secara umum mengadopsi konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2014.

PILAR STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA DAN SAK ENTITAS PRIVAT

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), **Standar Akuntansi Keuangan (SAK)** merupakan kumpulan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntan Keuangan (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI).



PILAR STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA DAN SAK ENTITAS PRIVAT

Pilar 1: SAK Internasional

SAK Internasional yang berlaku 1 Januari 2024 merupakan PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI yang mengadopsi penuh IFRS Accounting Standards yang diterbitkan oleh IASB → ENTITAS PUBLIK

Pilar 2: SAK Indonesia

SAK Indonesia diterbitkan oleh DSAK IAI dan DSAS IAI yang terdiri PSAK dan ISAK, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas di bawah pengawasannya, selama peraturan regulator pasar modal tersebut tidak bertentangan dengan PSAK dan ISAK yang khusus mengatur transaksi, peristiwa, atau kondisi tertentu → ENTITAS PUBLIK, DAN ENTITAS PRIVAT YANG MEMILIH SAK INDONESIA

Pilar 3: SAK Indonesia untuk EP

SAK Indonesia untuk Entitas Privat yang diterbitkan oleh DSAK IAI yang dapat digunakan oleh Entitas Privat atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan SAK dimaksud. SAK EP mulai diterapkan 1 Januari 2025 menggantikan SAK ETAP.

Pilar 4: SAK Indonesia untuk EMKM

SAK Indonesia untuk EMKM adalah standar akuntansi yang diterbitkan DSAK IAI dan dirancang untuk digunakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (EMKM). Kriteria entitas atau perusahaan yang termasuk dalam kategori EMKM merujuk pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

SAK ENTITAS KECIL, MIKRO, MENENGAH (EMKM) & SAK SYARIAH

SAK EMKM	SAK SYARIAH (SAS)
merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan (UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM)	Berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah
standar sederhana untuk mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dengan dasar pengukuran menggunakan biaya historis	Dasar pengembangan SAK Syariah yaitu Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)
efektif 1 Januari 2018	Mengatur transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, istishna, salam, mudharabah, musyarakah, ijarah, dsb.

PERBEDAAN SAK EP DAN SAK ETAP

SAK EP	SAK ETAP
Lebih komprehensif dibanding dengan SAK ETAP namun SAK EP menyajikan penyederhanaan agar diterapkan oleh entitas privat tanpa biaya atau upaya yang berlebihan	Digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik
Meningkatkan akses terhadap pendanaan seperti pinjaman bank	Bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan memberikan kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dan perbankan
Meningkatkan keterbandingan atau komparabilitas laporan keuangan entitas privat	SAK ETAP tidak mengacu pada SAK Umum
Meningkatkan kualitas laporan keuangan	

PERBEDAAN SAK EP DAN SAK ETAP (BAB PER BAB)

SAK EP	SAK ETAP
35 Bab Pengaturan	30 Bab Pengaturan
Laporan Posisi Keuangan	Neraca
Laporan PHU (Laba Rugi) dan penghasilan komprehensif	Laporan PHU (Laba Rugi)
Laporan keuangan konsolidasian	-
Hibah Pemerintah	-
Perhitungan Bunga Efektif	Perhitungan bunga akrual
penyisihan pinjaman tak tertagih dalam perhitungannya berbasis resiko kredit dalam pinjaman	Penyisihan dicatat ketika pinjaman tak tertagih sudah terjadi
Pengakuan asset dan liabilitas pajak tangguhan	-
Pengungkapan pihak berelasi	-



Laporan Keuangan Koperasi



LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

Berdasarkan Permenkop No. 2 Pasal 8 Tahun 2024, Laporan Keuangan Koperasi yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat meliputi:

- 1 Laporan Posisi Keuangan
- 2 Laporan Perhitungan Hasil Usaha (*Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain jika dalam SAK EP*)
- 3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 4 Laporan Arus Kas
- 5 Catatan atas Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

Berdasarkan Permenkop No. 2 Pasal 8 Tahun 2024, Laporan Keuangan **KSPPS/USPPS** yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat meliputi:

- 1 Laporan Posisi Keuangan
- 2 Laporan Perhitungan Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain jika dalam SAK EP)
- 3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 4 Laporan Arus Kas
- 5 Catatan atas Laporan Keuangan
- 6 Laporan Penyaluran Dana Zakat
- 7 Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- 8 Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

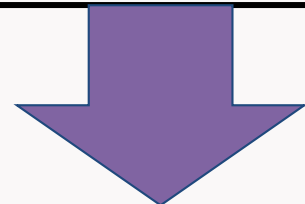
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan keuangan yang menyajikan hubungan aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas Koperasi pada tanggal tertentu (juga disebut neraca).

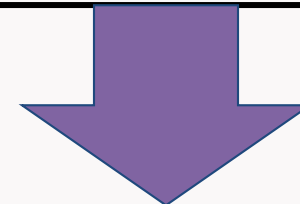
Sumber: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024

KLASIFIKASI DALAM LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan		
Aset	Liabilitas	Modal/Ekuitas
Aset Lancar	Jangka Pendek	Simpanan Pokok dan Wajib
Aset Tidak Lancar	Jangka Panjang	Hibah dan Cadangan



Diklasifikasikan berdasarkan
masa manfaat aset



Diklasifikasikan berdasarkan
jangka waktu penyelesaian
liabilitas

Aset Lancar

Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki instensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam **siklus operasi normal**;

Entitas memiliki aset untuk **tujuan diperdagangkan**;

Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu **12 bulan setelah tanggal pelaporan**; atau

Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya **12 bulan setelah tanggal pelaporan**

Contoh:

1. Kas dan setara kas
2. Piutang usaha
3. Persediaan
4. Perlengkapan kantor
5. Beban dibayar dimuka
6. Investasi jangka pendek (*Trading Securities*)

Aset Tidak Lancar

Di luar kriteria Aset Lancar, dikelompokkan sebagai aset tidak lancar

Contoh:

1. Aset Tetap (Tanah, Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin)
2. Properti Investasi
3. Investasi jangka panjang
4. Aset tidak berwujud
5. Aset hak guna
6. Aset pajak tangguhan

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam **siklus operasi normal**;

Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk **tujuan diperdagangkan**;

Liabilitas yang jatuh tempo dalam jangka **12 bulan setelah periode pelaporan**; atau

Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya **12 bulan setelah periode pelaporan**

Contoh:

1. Utang usaha
2. Utang pajak
3. Beban yang masih harus dibayar
4. Pendapatan diterima dimuka
5. Utang bank jangka pendek
6. Utang bunga

Liabilitas Jangka Panjang

Di luar kriteria Liabilitas Jangka Pendek, dikelompokkan sebagai Liabilitas Jangka Panjang

Contoh:

1. Utang bank jangka panjang
2. Liabilitas sewa
3. Utang imbalan kerja jangka panjang
4. Utang obligasi
5. Liabilitas pajak tangguhan

EKUITAS

Hak residual (sis) atas aset Koperasi setelah dikurangi seluruh liabilitas

SIMPANAN POKOK	Saat menjadi anggota, wajib membayarkan sejumlah uang yang sama banyaknya kepada Koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota
SIMPANAN WAJIB	Simpanan dengan jumlah tertentu yang wajib dibayarkan anggota kepada koperasi. Simpanan ini tidak dapat diambil selama menjadi anggota
HIBAH	Sejumlah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa. Hibah dapat digunakan sebagai modal usaha dan menjadi hak Koperasi sebagai badan hukum
CADANGAN	Penyisihan SHU untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi. Umumnya berupa Cadangan Umum atau Cadangan Risiko
SISA HASIL USAHA (SHU)	Selisih pendapatan dan biaya yang diperoleh Koperasi dalam satu tahun buku
EKUITAS LAIN	Elemen ekuitas lain selain yang disebutkan diatas

LAPORAN POSISI KEUANGAN

KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM Laporan Posisi Keuangan Tanggal 31 Desember 20x1 dan 20x2		
	20x1	20x2
ASET		
Kas dan setara kas	x	x
Piutang bunga	x	x
Pinjaman anggota	x	x
Penyisihan pinjaman	(x)	(x)
Pinjaman koperasi lain	x	x
Penyisihan pinjaman	(x)	(x)
Aset tetap	x	x
Akumulasi penyusutan	(x)	(x)
Aset tak berwujud	x	x
Akumulasi amortisasi	(x)	(x)
Aset lain	x	x
Total aset	x	x
LIABILITAS		
Utang bunga	x	x
Simpanan anggota	x	x
Simpanan koperasi lain	x	x
Utang pinjaman	x	x
Liabilitas imbalan kerja	x	x
Liabilitas lain	x	x
Total liabilitas	x	x
EKUITAS		
Simpanan pokok/ modal tetap	x	x
Simpanan wajib/ modal tambahan	x	x
Cadangan Umum	x	x
Cadangan Risiko	x	x
Sisa hasil usaha	x	x
Ekuitas lain	x	x
Total ekuitas	x	x
Total liabilitas dan ekuitas	x	x

Sumber:
Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Laporan keuangan yang menyajikan seluruh objek penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, termasuk objek dari penghasilan komprehensif lain.

Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha → Sisa Hasil Usaha (SHU).

Sumber: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024

PENYAJIAN LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Penghasilan

Kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk **arus masuk** atau **peningkatan asset** atau **penurunan liabilitas** yang mengakibatkan **kenaikan ekuitas**, selain yang berkaitan dengan partisipasi modal anggota

Sisa Hasil Usaha

Laba atau rugi selama suatu periode yang berasal dari partisipasi anggota setelah dikurangi beban usaha, penyusutan, dan kewajiban lainnya (termasuk pajak)

Sumber: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024

PENYAJIAN LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pendapatan

Arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal Koperasi selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari partisipasi Anggota

1. Pendapatan dari partisipasi anggota

adalah pendapatan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan anggota.

2. Pendapatan dari Bisnis dengan Non Anggota

adalah pendapatan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan non anggota.

Sumber: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024

PENYAJIAN LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Beban

Penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau deplesi asset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan pembagian SHU kepada Anggota.

1. **Harga pokok penjualan/ beban pokok usaha** adalah biaya produksi barang jadi yang terjual/ seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dagang yang terjual.
2. **Beban Usaha** adalah seluruh beban yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan utama koperasi (termasuk beban utilitas, beban gaji, beban penyusutan, dst)

Sumber: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024

PENYAJIAN LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Hasil investasi

Perolehan balas jasa yang diterima atas investasi yang dilakukan oleh Koperasi berupa bunga, bagi hasil (investasi syariah), dividen, dan *capital gain*

Keuntungan

Objek lain yang memenuhi definisi penghasilan tetapi bukan pendapatan.

Kerugian

Objek lain yang memenuhi definisi beban dan dapat timbul dari aktivitas normal koperasi

Sumber: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024

PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Penghasilan Komprehensif

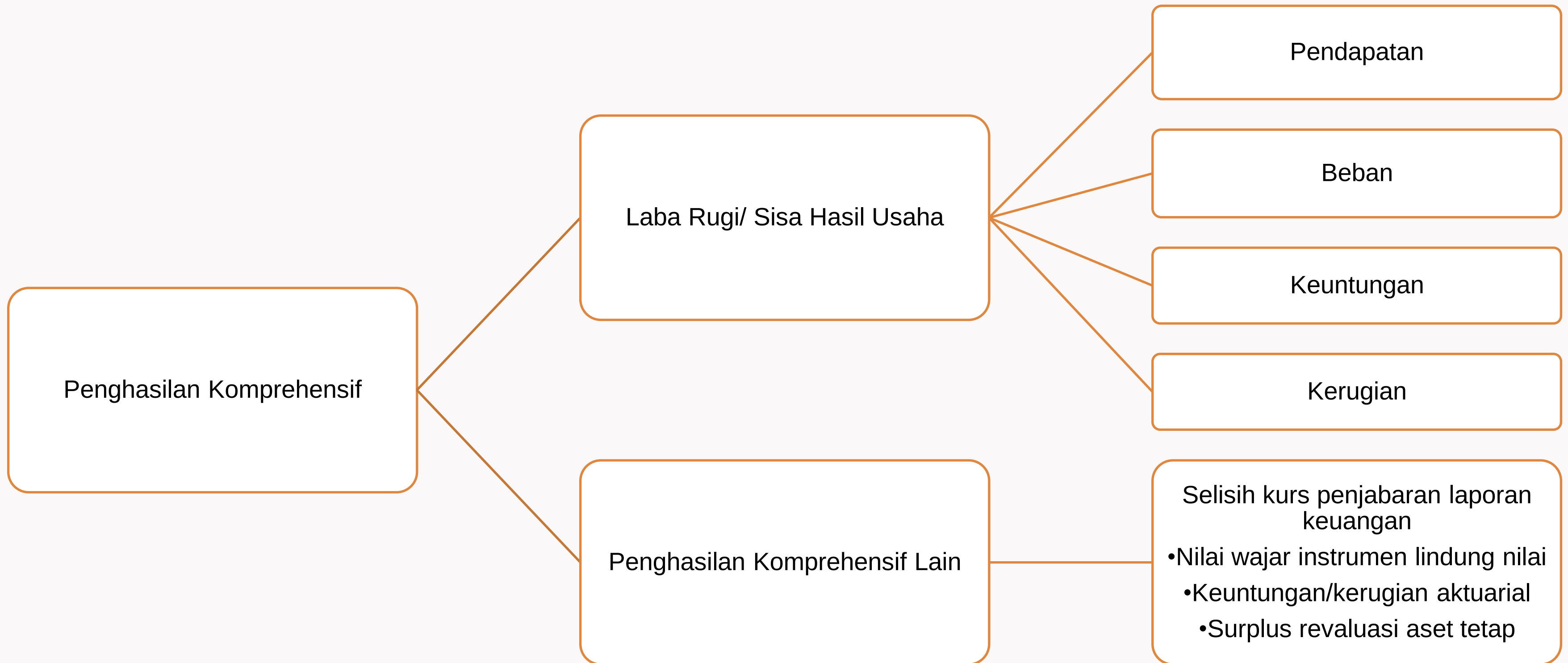
Jumlah SHU + Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain

Objek penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam laba atau rugi (Sisa Hasil Usaha)

Sumber: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024

PENGHASILAN KOMPREHENSIF



Sumber: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA KSP/ USP

KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM Laporan Perhitungan Hasil Usaha Tahun yang berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x2		
	20x1	20x2
PARTISIPASI ANGGOTA		
Pendapatan bunga	x	x
Pendapatan usaha lain	x	x
Jumlah partisipasi anggota	x	x
BEBAN USAHA		
Beban bunga	x	x
Beban penyisihan	x	x
Beban kepegawaian	x	x
Beban administrasi dan umum	x	x
Beban penyusutan dan amortisasi	x	x
Beban usaha lain	x	x
Jumlah beban usaha	x	x
SISA HASIL USAHA BRUTO		
Hasil Investasi	x	x
Beban Perkoperasian	x	x
PENDAPATAN & BEBAN LAIN		
Pendapatan lain	x	x
Beban lain	x	x
Sisa hasil usaha sebelum pajak	x	x
Beban pajak penghasilan	x	x
SISA HASIL USAHA NETO	x	x
Penghasilan komprehensif lain	x	x
PENGHASILAN KOMPREHENSIF	x	x



PENJUALAN	x	x
Beban pokok penjualan	LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	
Laba bruto		
Penghasilan lain	x	x
Beban lain	x	x
Bagian laba entitas asosiasi	x	x
LABA SEBELUM PAJAK	x	x
Beban pajak	x	x
LABA DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	x	x
Rugi dari operasi yang dihentikan	x	x
LABA (RUGI)	x	x
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Surplus revaluasi aset tetap	x	x
Keuntungan/kerugian aktuarial	x	x
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	x	x
Pajak penghasilan terkait	(x)	(x)
Akan direklasifikasi ke laba rugi		
Lindung nilai ⁴¹ arus kas	x	x
Pajak penghasilan terkait	(x)	(x)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF	x	x
Laba (rugl) diatribusikan pada:		
Pemilik entitas induk	x	x
Kepentingan nonpengendali	x	x
Penghasilan komprehensif diatribusikan pada:		
Pemilik entitas induk	x	x
Kepentingan nonpengendali	x	x

PENJUALAN	x	x
Beban pokok penjualan	LAPORAN LABA RUGI	
Laba bruto		
Penghasilan lain	x	x
Beban lain	x	x
Bagian laba entitas asosiasi	x	x
LABA SEBELUM PAJAK	x	x
Beban pajak	x	x
LABA DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	x	x
Rugi dari operasi yang dihentikan	x	x
LABA (RUGI)	x	x
Laba (rugl) diatribusikan pada:		
Pemilik entitas induk	x	x
Kepentingan nonpengendali	x	x

LABA (RUGI)	x	x
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	
Tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Surplus revaluasi aset tetap	x	x
Keuntungan/kerugian aktuarial	x	x
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	x	x
Pajak penghasilan terkait	(x)	(x)
Akan direklasifikasi ke laba rugi		
Lindung nilai arus kas	x	x
Pajak penghasilan terkait	(x)	x
PENGHASILAN KOMPREHENSIF	x	x
Penghasilan komprehensif diatribusikan pada:		
Pemilik entitas induk	x	x
Kepentingan nonpengendali	x	x

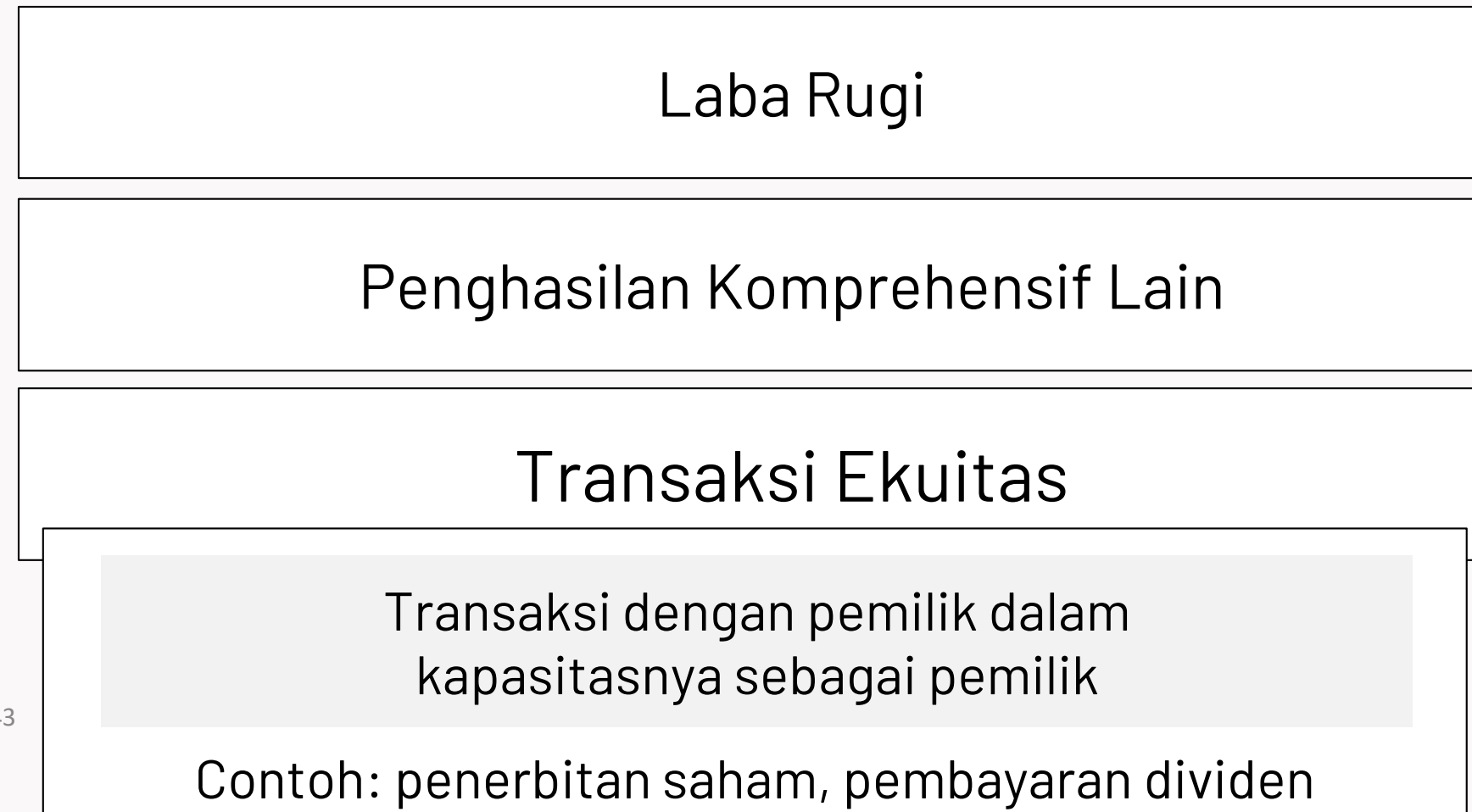
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan keuangan yang menyajikan:

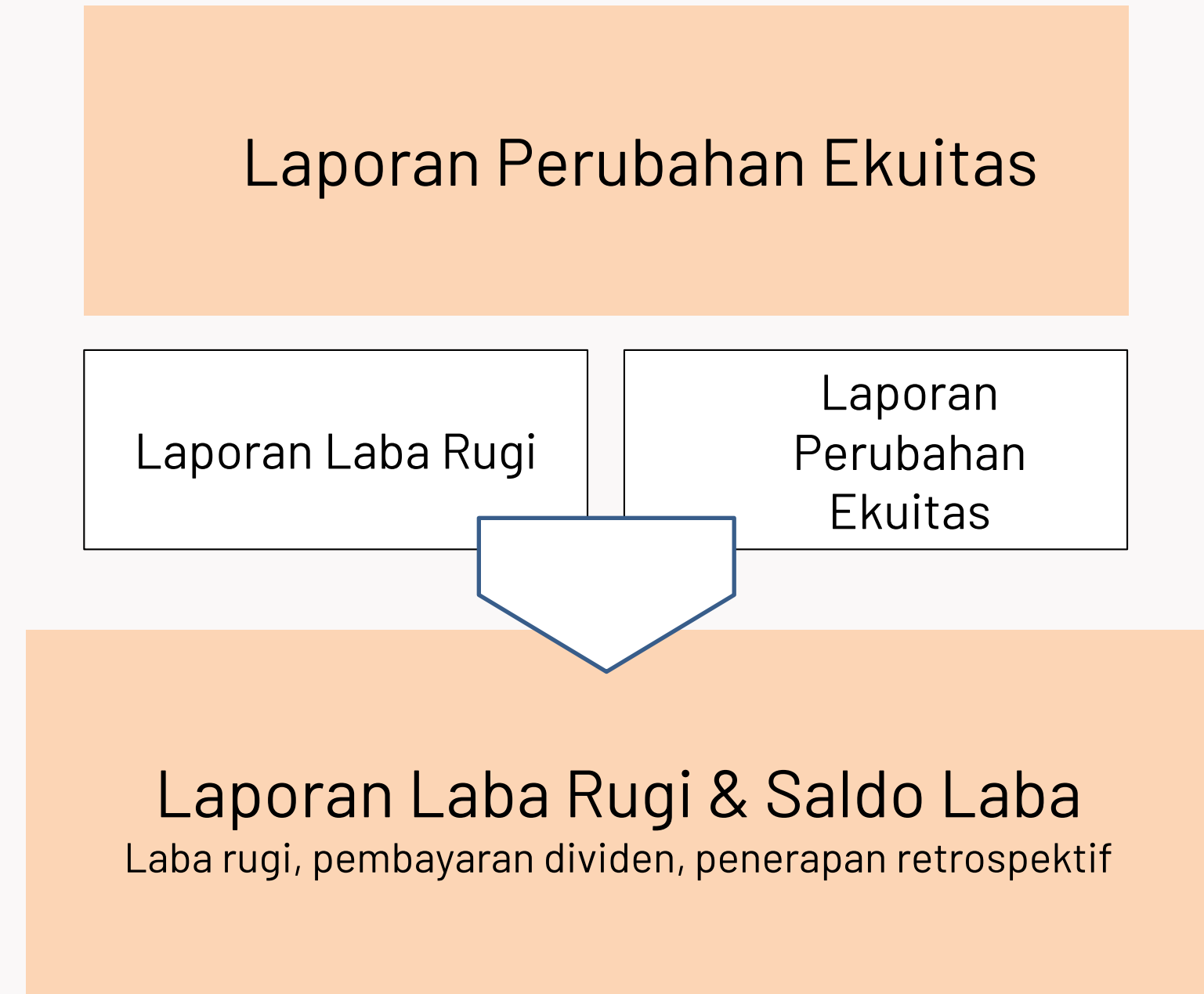
- Sisa Hasil Usaha dan penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, objek penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut
- Dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi
- Koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut
- Jumlah transaksi ekuitas dengan Anggota dalam kapabilitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut.

Sumber: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



43



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

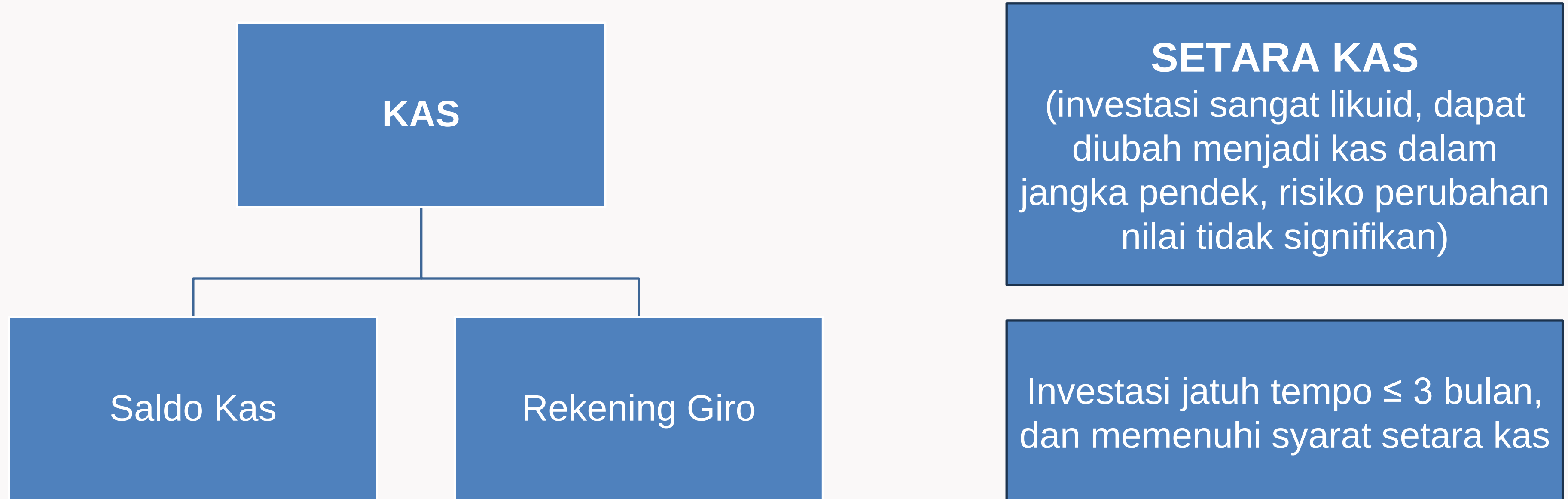
KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM Laporan Perubahan Ekuitas Tahun yang berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x2						
	Modal		Sisa Hasil Usaha	Cadangan		Ekuitas Lain
	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib		Cadangan Umum	Cadangan Risiko	
Saldo 1 Januari 20x1	x	x	x	x	x	x
Perubahan ekuitas di 20x1:						
Sisa hasil usaha	-	-	x	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	x
Pembagian sisa hasil usaha	-	-	(x)	x	x	-
Penambahan modal	x	x	-	-	-	-
simpanan pokok/ modal tetap	x	x	-	-	-	-
simpanan wajib/ modal tambahan	x	x	-	-	-	-
Pengurangan modal	(x)	(x)	-	-	-	-
simpanan pokok/ modal tetap	(x)	(x)	-	-	-	-
simpanan wajib/ modal tambahan	(x)	(x)	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 20x1	x	x	x	x	x	x
Perubahan ekuitas di 20x2:						
Sisa hasil usaha	-	-	x	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	x
Pembagian sisa hasil usaha	-	-	(x)	x	x	-
Penambahan modal	x	x	-	-	-	-
simpanan pokok/ modal tetap	x	x	-	-	-	-
simpanan wajib/ modal tambahan	x	x	-	-	-	-
Pengurangan modal	(x)	(x)	-	-	-	-
simpanan pokok/ modal tetap	(x)	(x)	-	-	-	-
simpanan wajib/ modal tambahan	(x)	(x)	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 20x2	x	x	x	x	x	x

LAPORAN ARUS KAS

Laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas Koperasi untuk suatu periode, menunjukkan secara terpisah perubahan selama periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Sumber: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024

KAS DAN SETARA KAS



Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat

FUNGSI LAPORAN ARUS KAS

Memberikan informasi untuk membantu menilai:

1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan
2. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban
3. Alasan perbedaan antara SHU bersih dan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi
4. Investasi tunai dan transaksi pembiayaan dalam periode tersebut.

KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS

Aktivitas Operasi

- Aktivitas utama Koperasi dalam menghasilkan pendapatan dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi/ pendanaan.

Aktivitas Investasi

- Perolehan dan pelepasan asset jangka Panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

Aktivitas Pendanaan

- Aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi atas ekuitas dan pinjaman.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI



- 1. Metode Langsung:** Menghitung arus kas berdasarkan kelas utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto
- 2. Metode Tidak Langsung:** Menghitung arus kas dengan menyesuaikan laba rugi/ SHU bersih

ARUS KAS OPERASI – METODE TIDAK LANGSUNG

Akun	Nilai	Efek pada SHU Bersih
Aset Lancar	Bertambah	Mengurangi
Aset Lancar	Berkurang	Menambah
Liabilitas Jangka Pendek	Bertambah	Mengurangi
Liabilitas Jangka Pendek	Berkurang	Menambah

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI



ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN



PENYAJIAN ITEM DALAM LAPORAN KAS

Akun	Aktivitas Operasi	Aktivitas Investasi	Aktivitas Pendanaan
Bunga yang dibayarkan	✓		✓
Pendapatan Bunga	✓	✓	
SHU yang dibayarkan	✓		✓
Pendapatan Dividen	✓	✓	

TRANSAKSI NON KAS

Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas tidak termasuk dalam laporan arus kas.

Contoh:

- Perolehan aset secara kredit
- Akuisisi Perusahaan lain melalui penerbitan saham

LAPORAN ARUS KAS

ARUS KAS DARI OPERASI				
...	Penghasil utama pendapatan dan aktivitas lainnya yang bukan investasi dan pendanaan	Metode langsung	x	x
...			x	x
...		Metode tidak langsung	x	x
...			x	x
ARUS KAS DARI INVESTASI				
...	Aset tidak lancar dan investasi selain setara kas		x	x
...			x	x
...			x	x
...			x	x
ARUS KAS DARI PENDANAAN				
...	Modal dan pinjaman		x	x
...			x	x
...			x	x
...			x	x
PERUBAHAN ARUS KAS			x	x
SALDO AWAL			x	x
SALDO AKHIR			x	x

LAPORAN ARUS KAS

KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM Laporan Arus Kas Tahun yang berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x2		
	20x1	20x2
KEGIATAN OPERASI		
Penerimaan simpanan anggota dan koperasi lain	x	x
Penyaluran pinjaman kepada anggota dan koperasi lain	(x)	(x)
Penerimaan dari pinjaman kepada anggota dan koperasi lain	x	x
Penerimaan bunga dari pinjaman kepada anggota dan koperasi lain	x	x
Pembayaran bunga dari simpanan anggota dan koperasi lain	(x)	(x)
Penerimaan utang pinjaman kepada pihak lain	x	x
Pembayaran utang pinjaman kepada pihak lain	(x)	(x)
Pembayaran bunga utang pinjaman kepada pihak lain	(x)	(x)
Biaya imbalan kerja	(x)	(x)
Biaya operasional	(x)	(x)
Jumlah arus kas operasi	x	x
KEGIATAN INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(x)	(x)
Pelepasan aset tetap	x	x
Perolehan aset tak berwujud	(x)	(x)
Pelepasan aset tak berwujud	x	x
Jumlah arus kas investasi	x	x
KEGIATAN PENDANAAN		
Penambahan modal:		
Simpanan pokok/ modal tetap	x	x
Simpanan wajib/ modal tambahan	x	x
Pengurangan modal:		
Simpanan pokok/ modal tetap	(x)	(x)
Simpanan wajib/ modal tambahan	(x)	(x)
Pembagian sisa hasil usaha	(x)	(x)
Jumlah arus kas pendanaan	x	x
KENAIKAN (PENURUNAN)	x	x
SALDO AWAL	x	x
SALDO AKHIR	x	x

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan yang berisi informasi penjelasan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, termasuk kebijakan dan metode akuntansi.

Catatan atas laporan keuangan yang menyediakan deskripsi naratif/ pemisahan objek yang disajikan dalam laporan keuangan, termasuk transaksi pihak yang berelasi. Informasi mengenai objek yang tidak memenuhi syarat pengakuan dalam laporan keuangan.

Sumber: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK EP
2. Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan
3. Informasi pendukung pos-pos laporan
4. Pengungkapan lain
5. Pihak Berelasi

PIHAK BERELASI

Pengungkapan sifat hubungan, kompensasi manajemen kunci, transaksi pihak berelasi.

Pihak berelasi:

Orang & Keluarga Dekat
• Pengendalian atau pengendalian bersama • Pengaruh signifikan • Personil manajemen kunci entitas/ entitas induk

Entitas
• Kelompok usaha (group) • Ventura bersama & entitas asosiasi • dll

Sumber: Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024



KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

60



KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Pinjaman yang diberikan/diterima, **simpanan** diterima diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan **suku bunga efektif**

Pendapatan/beban bunga diukur dengan metode suku **bunga efektif**

Penyisihan pinjaman tidak tertagih ditentukan berdasarkan bukti objektif (*incurred loss*): **CKPN** individual & kolektif

Aset tetap & aset tak berwujud pada biaya perolehan (model biaya)

Keuntungan/kerugian aktuarial diakui di sisa hasil usaha

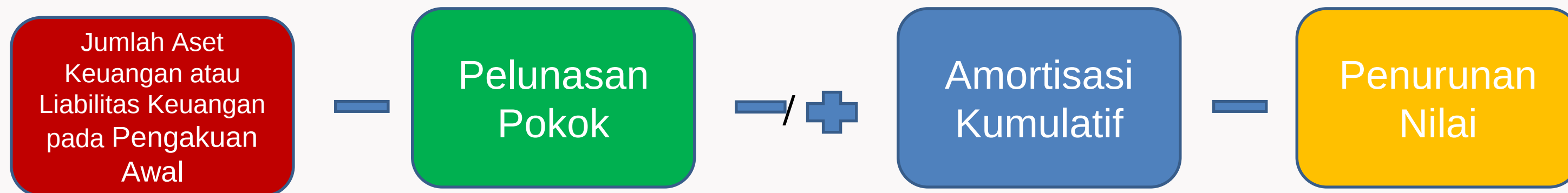
Simpanan pokok/modal tetap dan simpanan wajib/modal tambahan, SHU, dana cadangan, ekuitas lain disajikan di ekuitas

INSTRUMEN KEUANGAN

- **Definisi:** Instrumen Keuangan adalah kontrak yang menimbulkan asset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas pada entitas lainnya.
- **Contoh Instrumen Keuangan Dasar** (Mengacu pada SAK EP Bab 11):
 1. Kas, Giro dan Deposito;
 2. Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) dan Surat Utang (Commercial Bills);
 3. Piutang dan utang, Wesel Tagih dan Wesel Bayar, Pinjaman Diberikan dan Pinjaman Diterima;
 4. Obligasi dan Instrumen Utang serupa;
 5. Instrumen dalam Saham Preferen yang tidak dapat dikonversi dan Saham Biasa/ Saham Preferen tanpa opsi jual;
 6. Komitmen untuk menerima Pinjaman, jika komitmen tidak dapat dilunasi dengan kas.
- Contoh Instrumen Keuangan yang kompleks: Efek Beragun, Opsi, Hak Waran, Kontrak Future, Forward, Swap Suku Bunga, Lindung Nilai dan sejenisnya mengacu pada SAK EP Bab 12.
- Koperasi mengakui asset keuangan atau liabilitas keuangan hanya jika Koperasi menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan tersebut.

PERLAKUAN AKUNTANSI *Untuk* INSTRUMEN KEUANGAN

- **Pengukuran Awal:** Biaya Historis (Biaya Perolehan).
- **Pengukuran Selanjutnya:** Biaya Perolehan Diamortisasi Menggunakan Metode Bunga Efektif.
- **Penyajian Dalam Laporan Keuangan:** Biaya Perolehan Diamortisasi (*Amortised Cost*).
- **Metode Perhitungan** Biaya Perolehan Diamortisasi Menggunakan Suku Bunga Efektif adalah Nilai Bersih dari hasil penjumlahan komponen:



- Metode Suku Bunga Efektif menghitung Biaya Perolehan Diamortisasi dan mengalokasikan Penghasilan Bunga atau Beban Bunga selama periode yang relevan melalui amortisasi.
- Amortisasi per periode dihitung berdasarkan selisih antara Bunga Efektif dengan Bunga Kontraktual.

SUKU BUNGA EFEKTIF

SUKU BUNGA EFEKTIF suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, periode yang lebih singkat ke jumlah tercatat neto dari aset keuangan

$$\text{Cash out} = \frac{\text{Cash in}_1}{(1+i)} + \frac{\text{Cash in}_2}{(1+i)^2} + \frac{\text{Cash in}_3}{(1+i)^3} + \dots + \frac{\text{Cash in}_t}{(1+i)^t}$$

Prinsip **Perlakuan Akuntansi Simpanan dan Pinjaman** antara lain:

- **Pinjaman** yang diberikan/diterima, **simpanan** diterima diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan **suku bunga efektif**;
- **Pendapatan/beban bunga** diukur dengan metode suku **bunga efektif**

PERLAKUAN AKUNTANSI *Untuk* INSTRUMEN KEUANGAN

INSTRUMEN KEUANGAN	DESKRIPSI	PENGUKURAN AWAL	PENGUKURAN LANJUTAN	PENYAJIAN
SURAT BERTHARGA	Surat berrga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah	Biaya Perolahan ditambah/ dikurangi Biaya Transaksi	• Pendapatan Bunga dengan Suku Bunga Efektif • Biaaya Perolehan Diamortisasi	• Biaya Perolehan Diamortisasi, dlam pos tersendiri dalam Laporan Posisi Keuangan.
PENEMPATAN DANA PADA BANK/ KOPERASI LAIN	Penempatan dana Koperasi pada Bank atau Koperasi lain berupa: Giro, Taabungan, Deposito, Sertifikat Deposito	Biaya Perolehan, kecuali untuk Sertifikat Deposito dengan Diskonto.	Biaya Perolehan Diamortisasi	• Pos tersendiri pada Laporan Posisi Keuangan sebesar Biaya Perolehan Diamortisasi • Nilai Neto dikurangi CKPN • Tidak Boleh dikompensasi dengan liabilitas pada Bank/ Koperasi yang sama.
PINJAMAN	Penyediaan dana atau tagihan, berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan anggota peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.	• Biaya Historis sebesar pinjaman yang diberikan ditambah/ dikurangi biaya transaksi. • Pendapatan suku bunga diukur dengan bunga efektif.	Biaya Perolehan Diamortisasi	• Pos tersendiri sebesar Harga Perolehan • Pendapatan Bunga diakui secara akrual yang diakui sebagai Piutang Bunga • Jika Koperasi menerima biaya provisi, sedang pinjaman baru ditarik anggota melewati akhir periode pelaporan, maka saldo 'Pinjaman' akan bernilai negatif, sehingga disajikan sebagai Kewajiban Lainnya.
SIMPANAN	Dana yang dipercayakan anggota dan koperasi lain berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka	• Diakui sebesar Nominal Penyetoran/ Penarikan, atau Nilai yang tercantum dalam Biyet Simpanan Berjangka	• Biaya Perolehan Diamortisasi • Perhitungan beban bunga menggunakan suku bunga efektif • Amortisasi biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung diakui sebaagai Beban Bunga.	• Pos tersendiri dalam Laporan Posisi Keuangan • Biaya Perolehan Diamortisasi

CONTOH 1: PERHITUNGAN BUNGA EFEKTIF

1 JAN 2025	
Pokok	Rp100 juta
Bunga	12% (fixed) per tahun
Administrasi	1%
Waktu	4 tahun
BUNGA EFEKTIF	12,33%

$$i = 12,33\% \leftarrow 99.000 = \frac{12.000}{(1+i)} + \frac{12.000}{(1+i)^2} + \frac{12.000}{(1+i)^3} + \frac{112.000}{(1+i)^4}$$

TAHUN	ARUS KAS	SALDO AWAL	BUNGA EFEKTIF	ANGSURAN BUNGA	ANGSURAN POKOK	SALDO AKHIR
		A	B A x 12,33%	C	D	E A + B - C - D
	(99.000)					99.000
2025	12.000	99.000	12.208	12.000	0	99.208
2026	12.000	99.208	12.234	12.000	0	99.442
2027	12.000	99.442	12.263	12.000	0	99.705
2028	112.000	99.705	12.295	12.000	100.000	0
	49.000		49.000	48.000	100.000	

	01/01/2025	Pinjaman – pokok	100.000		01/01/2025	Pinjaman	99.000	
		Pinjaman – administrasi		1.000		Kas		99.000
		Kas		99.000				
	31/12/2025	Piutang bunga	12.000		31/12/2025	Piutang bunga	12.000	
		Pinjaman – administrasi		208		Pinjaman		208
		Pendapatan bunga		12.208		Pendapatan bunga		12.208
		Kas	12.000			Kas	12.000	
		Piutang bunga		12.000		Piutang bunga		12.000
	31/12/2026	Piutang bunga	12.000		31/12/2026	Piutang bunga	12.000	
		Pinjaman – administrasi		234		Pinjaman		234
		Pendapatan bunga		12.234		Pendapatan bunga		12.234
		Kas	12.000			Kas	12.000	
		Piutang bunga		12.000		Piutang bunga		12.000
	31/12/2027	Piutang bunga	12.000		31/12/2027	Piutang bunga	12.000	
		Pinjaman – administrasi		263		Pinjaman		263
		Pendapatan bunga		12.263		Pendapatan bunga		12.263
		Kas	12.000			Kas	12.000	
		Piutang bunga		12.000		Piutang bunga		12.000
	31/12/2027	Piutang bunga	12.000		31/12/2027	Piutang bunga	12.000	
		Pinjaman – administrasi		295		Pinjaman		295
		Pendapatan bunga		12.295		Pendapatan bunga		12.295
		Kas	112.000			Kas	112.000	
		Piutang bunga		12.000		Piutang bunga		12.000
		Pinjaman – pokok		100.000		Pinjaman		100.000

CONTOH 2

1 JAN 2025	
Pokok	Rp100 juta
Bunga	20%
Administrasi	5%
Waktu	5 tahun
BUNGA EFEKTIF	24,68%

TAHUN	ARUS KAS	SALDO AWAL	BUNGA EFEKTIF	ANGSURAN BUNGA	ANGSURAN POKOK	SALDO AKHIR
		A	B A x 24,68%	C	D	E A + B - C - D
	(95.000)					95.000
2025	40.000	95.000	21.470	20.000	20.000	76.470
2026	36.000	76.470	17.283	16.000	20.000	57.750
2027	32.000	57.753	13.052	12.000	20.000	38.810
2028	28.000	38.806	8.770	8.000	20.000	19.580
2029	24.000	19.576	4.424	4.000	20.000	0
	65.000		65.000	60.000	100.000	

CONTOH 3

1 JAN 2025

Pokok Rp100 juta

Bunga 0%

Potongan Rp30 juta

Waktu 3 tahun

BUNGA EFEKTIF 12,62%

TAHUN	ARUS KAS	SALDO AWAL	BUNGA EFEKTIF	ANGSURAN BUNGA	ANGSURAN POKOK	SALDO AKHIR
		A	B	C	D	E
			A x 12,62%			A + B - C - D
	(70.000)					70.00
2025	0	70.00	8.84	0	0	78.84
2026	0	78.84	9.95	0	0	88.79
2027	100.000	88.79	11.21	0	100.000	0
	30.000		30.000	0	100.000	

PINJAMAN PENURUNAN NILAI

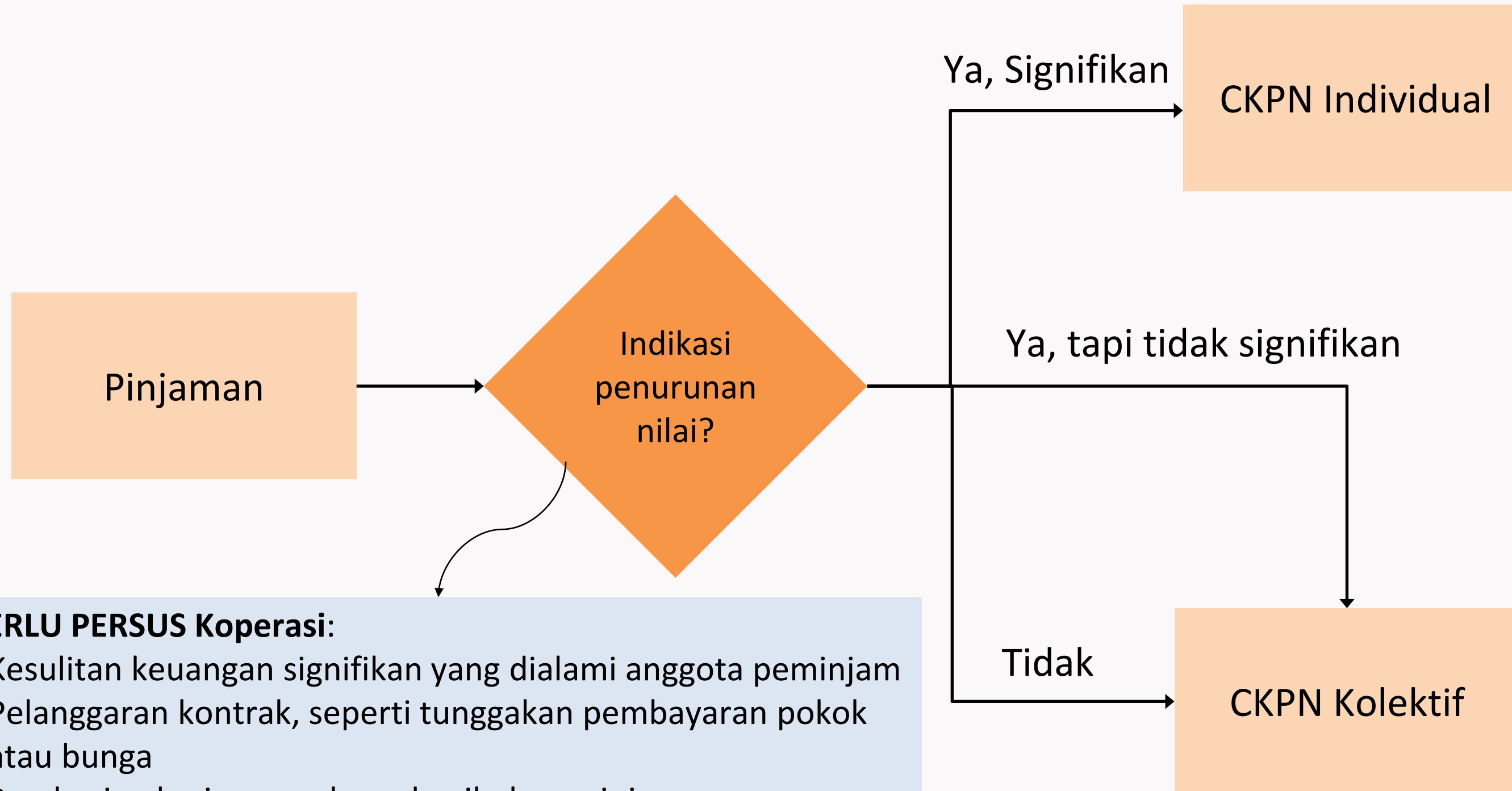
INTEREST Time value of money
Credit risk
Liquidity risk
Adm & service cost
Profit margin

1.000
↓
750

Konsep kerugian yang sudah terjadi
(*incurred loss concept*)

Untuk menghitung nilai CKPN,
menggunakan data historis (*historical
loss data*)

PINJAMAN PENURUNAN NILAI



PERLU PERSUS:
Pinjaman 10 Terbesar Koperasi,
atau Pinjaman dengan Nilai Baki
Debit $\geq$

PERLU PERSUS Koperasi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami anggota peminjam
- Pelanggaran kontrak, seperti tunggakan pembayaran pokok atau bunga
- Pemberian keringanan kepada pihak peminjam yang mengalami kesulitan (restrukturisasi pinjaman)
- Terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit

PROBABILITY OF DEFAULT

KUALITAS	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Lancar	100 jt	150 jt	300 jt	1.000 jt
Kurang Lancar	150 jt	400 jt	250 jt	150 jt
Macet	600 jt	400 jt	300 jt	90 jt
Kerugian riil (hapus buku)	100 jt	400 jt	200 jt	
% kerugian	100 : 600 = 17%	400 : 400 = 100%	200 : 300 = 67%	

Probabiliity of Default (PD)		
72 Migrasi	Lancar ke Kurang Lancar	$(20\% + 25\% + 20\%) : 3 = 22\%$
	Kurang Lancar ke Macet	$(30\% + 20\% + 25\%) : 3 = 25\%$
PD	Lancar ke Macet	$22\% \times 25\% = 5\%$
	Kurang Lancar ke Macet	25%

Loss Given Default (LGD)	
$(17\% + 100\% + 67\%) : 3 = 61\%$	
1.000 jt x 5% x 61%	30,50 jt
150 jt x 25% x 61%	22,86 jt
90 jt x 100% x 61%	54,90 jt
Penurunan nilai	Rp108,26 jt

LOSS RATE

Periode	Jumlah piutang hapus buku	Jumlah pengembalian	Jumlah kerugian
2023	1.000.000.000	200.000.000	800.000.000 (2,6%)
2024	800.000.000	400.000.000	400.000.000 (1,3%)
2025	1.100.000.000	500.000.000	600.000.000 (2,0%)

73

Sekelompok pinjaman
bersaldo Rp30 M

Tingkat kerugian historis = $(2,6\% + 1,3\% + 2,0\%) : 3 = 1,97\%$
 Jumlah penurunan nilai = $1,97\% \times \text{Rp30 M} = \text{Rp591 juta}$

DISCOUNTED CASHFLOW

Pada akhir 2025 terdapat pinjaman sebesar Rp250 juta yang telah jatuh tempo, tetapi belum dilunasi karena peminjam sedang mengalami kesulitan keuangan. Diperkirakan piutang tsb akan dilunasi pada akhir tahun 2026 (tingkat diskonto 12%)

$$PV = 250.000.000 : (1+12\%) = 223.214.286$$

$$\text{Penurunan nilai} = 250.000.000 - 223.214.286 = 26.785.714$$

31-12-25	Beban penurunan nilai	26.785.714	
	Akumulasi penurunan nilai		26.785.714
31-12-26	Akumulasi penurunan nilai	26.785.714	
	Pendapatan bunga (12% x 223.214.286)		26.785.714
	Kas	250.000.000	
	Pinjaman		250.000.000

PROPERTI INVESTASI

Tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa berdasarkan sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan bisnis normal

MODEL BIAYA

MODEL NILAI WAJAR (*nilai wajar andal berkesinambungan tanpa biaya atau upaya berlebihan*)

Perubahan nilai wajar di laba rugi (tanpa penyusutan)

Pada 1 Juli 2025 entitas membeli bangunan yang diperuntukan untuk disewa, seharga Rp100 M dan biaya lain terkait pembelian bangunan (notaris, dll) Rp5 M. Properti tsb diukur dengan model nilai wajar.

Selama tahun 2025, bangunan menghasilkan pendapatan sewa Rp6 M dan memunculkan beban Rp1 M. Nilai wajar pada 31 Des 2025 Rp108 M

Selama tahun 2025, bangunan menghasilkan pendapatan sewa Rp7 M dan memunculkan beban Rp1,5 M. Nilai wajar pada 31 Des 2025 Rp103 M

Properti investasi	105	
Kas		105
Kas/piutang	6	
Pendapatan sewa		6
Beban	1	
Kas/utang		1
Properti investasi	3	
Keuntungan		3
Kas/piutang	7	
Pendapatan sewa		7
Beban	1,5	
Kas/utang		1,5
Kerugian	2	
Properti investasi		2

ASET TETAP

Aset berwujud yang: dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode

MODEL BIAYA *(nilai wajar tidak andal tanpa biaya atau upaya berlebihan)*

MODEL REVALUASI

Perubahan nilai wajar di penghasilan komprehensif lain

Biaya perolehan Rp500 juta, Akumulasi penyusutan Rp200 juta

150%

Rp450 juta

Aset tetap	250 juta
Akumulasi penyusutan	100 juta
Surplus revaluasi	150 juta

	NILAI AWAL	FAKTOR	SETELAH REVALUASI
Biaya perolehan	Rp500 juta	150%	Rp750 juta
Akumulasi penyusutan	Rp200 juta	150%	Rp300 juta
Nilai tercatat	Rp300 juta		Rp450 juta

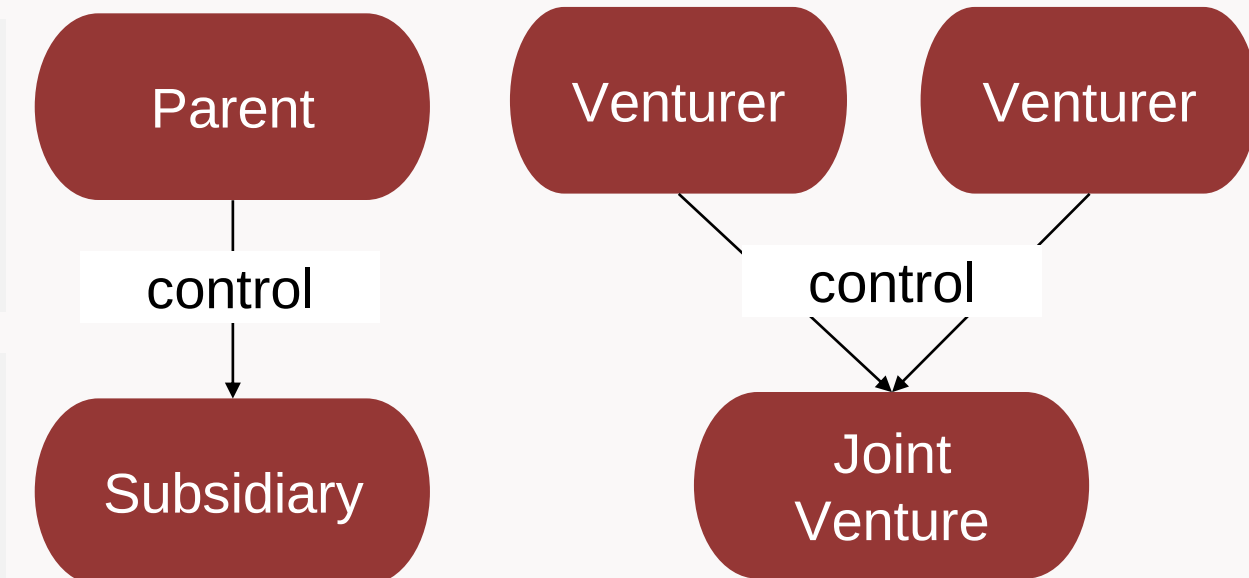
Akumulasi penyusutan	150 juta
Surplus revaluasi	150 juta

PERLAKUAN AKUNTANSI *Untuk* ASET NON KEUANGAN

ASET NON KEUANGAN	DESKRIPSI	PENGUKURAN AWAL	PENGUKURAN LANJUTAN	PENYAJIAN
PERSEDIAAN	Aset yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal; dalam proses produksi untuk penjualan tsb; dalam bentuk bahan baku/ perlengkapan utk dikonsumsi dalam proses produksi/ penyediaan jasa	Mengukur yang lebih rendah antara: biaya perolehan dan harga jual estimasian dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual.	Menggunakan rumus Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) dan rumus biaya rata-rata tertimbang.	- Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat persediaan akan diakui sebagai beban di periode dimana pendapatan diakui. - Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi.
INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI	Entitas dimana investor memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak maupun bagian kepemilikan dalam ventura bersama, termasuk entitas tidak berbadan hukum (seperti persekutuan)	- Model Biaya - Model Ekuitas - Model Nilai wajar	- Model Biaya - Model Ekuitas - Model Nilai wajar	- Investor mengklasifikasikan investasi pada entitas asosiasi sbg asset tidak lancar - Model biaya: jumlah dividen dan distribusi lain diakui sbg penghasilan - Metode ekuitas: dinyatkaan terpisah dalam laba rugi entitas asosiasi
INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA	Pengendalian bersama adl persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomik. Ventura bersama: pengaturan kontraktual dimana 2 atau lebih pihak melakukan aktivitas ekonomik yang merupakan subjek pengenalan bersama.	- Model Biaya - Model Ekuitas - Model Nilai wajar	- Model Biaya - Model Ekuitas - Model Nilai wajar	Pengendalian bersama operasi: Venturer mengakui dalam laporan keuangannya: asset yg dikendalikan dan liabilitasnya; beban yg terjadi dan bagian penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang/ jasa oleh ventura bersama tsb Pengendalian bersama asset:

PENYERTAAN SAHAM

Pengendalian	ENTITAS ANAK	Konsolidasi
Pengendalian bersama	VENTURA BERSAMA	Metode ekuitas Metode biaya Metode nilai wajar
Pengaruh signifikan	ENTITAS ASOSIASI	
Tidak ada	ASET KEUANGAN	Metode nilai wajar Metode biaya



Entitas yang membeli 25% saham perusahaan lain (80 juta lembar) pada 1 Jan 2025 seharga Rp100 M (Rp1.250/lembar) Pada 2025 perusahaan tsb melaporkan laba 40 M dan membagi dividen 30 M Nilai wajar saham di 31 Des 2025 adalah Rp1.500/lembar

Metode Nilai Wajar		Metode Biaya		Metode Ekuitas	
Investasi	100	Investasi	100	Investasi	100
Kas	100	Kas	100	Kas	100
-	-	-	-	Investasi	10
				Bagian laba	10
Kas	7,5	Kas	7,5	Kas	7,5
Pendapatan	7,5	Pendapatan	7,5	Investasi	7,5
Investasi	20	-	-	-	-
Keuntungan	20				
Aset investasi	120		100		102,5
Laba (rugi)	27,5		7,5		10

KONSOLIDASI

Entitas membeli 60% saham perusahaan seharga Rp63 M dan biaya terkait Rp 2 M, dimana nilai wajar aset neto perusahaan tsb adalah Rp70 M.

PENCATATAN AWAL	Investasi entitas anak	65	
	Kas		65
SAAT KONSOLIDASI	Aset neto	70	
	Goodwill <i>amortisasi maks 10 tahun</i>	23	
	Investasi entitas anak		65
	Kepentingan nonpengendali (40% x 70)		28

MITIGASI RISIKO PENERAPAN SAK EP

- Tren model usaha simpan pinjam Koperasi akan cenderung bersifat
- SAK EP akan mendorong: (1) proses konsolidasi usaha simpan pinjam koperasi, (2) pengembangan model usaha simpan pinjam koperasi menawarkan nilai proposisi yang unik untuk setiap kebutuhan anggota, dan (3) percepatan digitalisasi. Pada sisi lain, untuk Koperasi yang kecil akan cenderung menyederhanakan model bisnis produk simpanan dan pinjamannya.
- SAK EP mengatur penyajian pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai wajar, sehingga penerapan bunga efektif dan perhitungan penurunan nilai menjadi isu utama dalam menyesuaikan sistem aplikasi keuangan. Pastikan sistem aplikasi yang digunakan Koperasi telah sesuai dengan SAK EP?
- Koperasi perlu melakukan stress test atas penerapan SAK EP, sehingga dapat diantisipasi risiko atas penerapan SAK EP pada Koperasi Bapak/ Ibu, sebagai contoh:
 1. penerapan bunga efektif berpotensi Koperasi melanggar ketentuan batas suku bunga simpanan (9%) dan pinjaman (24%) yang ditetapkan dalam PermenKop UKM No 8/ 2023 → Inovasi Pengembangan Produk Simpanan dan Pinjaman Koperasi;
 2. Penerapan CKPN berpotensi menurunkan SHU (bahkan SHU negatif), dengan dampak diperiksa pajak → Perbaiki Kualitas Pinjaman melalui Manajemen Pinjaman.
- Koperasi perlu menyusun Peraturan Khusus untuk menetapkan kebijakan akuntansi dalam rangka melaksanakan SAK EP yang paling menguntungkan dan selaras dengan model bisnis untuk Koperasi Bapak/ Ibu.



TERIMA KASIH

